UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aimee Emby, 2014, *Human Rights Information Booklet For Prisoners,* London, Prison Reform Trust.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.

_____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Kencana, Jakarta.

_____, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Convention Against Torture Iniviative, *Convention Against Toture and Other Curel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and Optional Protocol to the Convention Against Toture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,* Rpute de Ferney, Jenewa.

Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto, Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,* Medpress Digital, Yogyakarta.

Eddyono, Supriyadi Widodo Erasmus, A.T. Napitupulu, et al., 2017, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Supriyadi Widodo Eddyono, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010, *Protokol Optional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan,* republique et canton de genève.

Gunadi, Senjaya, Oci, 2020, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*, CV. Budi Utama, Sleman.

Hermawan, Sigit, Amirullah, 2021, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif,* Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang.

Kurniawan, Yunan Prasetyo, 2022, *Penitensier,* Damera Press, Jakarta Selatan

MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Meyerson, Denise, Catriona Mackenzie, *et al*, 2021, *Procedural Justice in Law, Psychology, and Philosophy,* Routledge, New York.

Mochtar, Zainal Arifin, Hiariej, Eddy O.S, 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia.

Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S.M, et al, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta Selatan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Right, 2005, *Human Rights and Prisons, A Pocket of International Human Right Standards for Prison Officials,* New York and Geneva.

Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *POLITIK HUKUM PIDANA Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, Pakpahan, Novritsar Hasintongan, 2022, *Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat,* K-Media, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

R, Sakti Ramdhon Syah, 2020, *Perundang-Undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya,* CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.

Renggong, Ruslan, 2016, *HUKUM ACARA PIDANA Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia,* Prenada Media Group, Jakarta.

Sadewo, Fajar Ari, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah.

Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta,

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,* UI-Press, Jakarta.

Soerjono, Soekanto, Sri, Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Rajawali Pers, Depok.

Tyler, Tom R., 2011, *Mechanisms of Legal Effect: Theories of Procedural Justice,* Robert Wood Johnson Foundation, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules),* International Centre, Austria.

_____, 2013, Addressing the Global Prison Crisis Strategy 2015-2017.

Yesmil Anwar, Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana,* Gramedia Widiasarana, Indonesia.

Zamrony, Mochtar, Zainal Arifin, *et al,* 2009, *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Keadilan*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Jurnal, Tesis, Makalah, Bahan Ajar

Abdurrifai, "Esensi Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda", *Disertasi,* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2021.

Abhinav Raj, "A Study On Substantive Justice and Procedural Justice", *International Journal of Novel Research and Development,* Vol. 8, No. 4, April, 2023.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan", *Pandecta,* Vol. 13, No. 2, Desember, 2019.

Agus Budianto, Afdhal Mahatta, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan", *Law Review,* Vol. 21, No. 3, Maret, 2022.

Ahmad Sanusi, "Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 14, No. 3, November, 2020.

Anders Bratholm, "Arrest And Detention in Norway", Vol. 108, No.336, *University of Pennsylvania Law Review,* 1960.

Arsyad Aldyan, "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefit", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,* Vol. 9, No. 11, November, 2022.

Berlian Simarmata, "Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP", *Mimbar Hukum,* Vol. 23, No. 1, Februari, 2011.

_____, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 7, No. 3, Juni, 2010.

Cekli Setya Pratiwi, "Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/Pid/B/2010/PT.SBY", *Jurnal Humanity,* Vol. 9, No. 1, Maret, 2013.

Dewi Meta Lutfian, 2018, "Kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban pada Tahap Penuntutan", *Tesis,* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia.

Elise Sergeant, Julie Barkworth, *et al,* "Procedural Justice in the Criminal Justice System", *Criminology and Criminal Justice,* September, 2020.

Endang Try Setyasih, "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia", *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 6, No. 1, 2023.

Elyna Amelia, Pudji Astuti, *et al.* "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang Mengalami *Over*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan", *Novum: Jurnal Hukum,* Vol. 6, No. 1, 2019.

Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie,* Vol. 1, No. 1, Juni, 2022.

Fransisca Avianti, 2008, "Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Tesis,* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Galang Tresno Prakoso S, Mitro Subroto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan", *Jurnal Komunikasi Hukum,* Vol. 9, No. 1, Februari, 2023.

Haryono, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 15, No. 1, Maret, 2021.

Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial", *Jurnal Mengkaji Indonesia,* Vol. 1, No. 1, Desember, 2022.

Hidayah Nur Fathimah, Sri Hartini, "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta", *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 12, No. 1, 2023.

I Gusti Ayu A.K.R.H., "The Influence of Structure, Substance, and Culture to the Forest Law Enforcement in Indonesia", *International Journal of Business, Economics, and Law,* Vol. 1, 2012.

Isl Aldiena Qodar, Supianto, *et al.* "Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember", *Jurnal Welfare State,* Vol. 1, No. 1, April, 2022.

Jastis P. Singai, Roy, R. Lembong, *et al,* "Pemberian Kewenangan dalam Penahanan Penyidik Penuntut Umum dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Administratum,* Vol. 11, No. 1, 2023.

Lawrence B Solum, "Procedural Justice", *Georgetown Law Faculty Publication and Other Works,* 881, 2004.

Lawrence M. Friedman, "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club", *Annu. Rev. Law Soc. Sci,* Vol. 1, No. 1, 2005.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lise Yolanda, "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia", *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Marcus, Priyo Gunarto, 2023, "Sifat Sitem Peradilan Pidana" *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Umum*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

_____, 2023, "Sistem Peradilan Pidana yang Ideal" *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Umum*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Markus Marselinus Soge, Rikson Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan", *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2022.

Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi,* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Muhammad Rizal Baehaqqi, "Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi tentang Implementasi *Standard Minimum Rules of the Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman), *Tesis,* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, *et al.*, "Legal System in the Perspectives of H.L,A Hart and Lawrence M. Friedman", *Peradaban Journal Law and Society,* Vol. 2, No. 1, 2023.

Nam Anshar, *et. al.*, "Pemahaman Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan bagi Petugas dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate," *Jurnal Pengabdian Masyarakat,* Vol. 1, No. 1, 2022.

Naufal Daffa Haika dan Herry Fernandes Butar B, "Analisis SWOT dalam Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Perbalingga", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 9, No. 4, 2022.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Petrus, Irwan Panjaitan, "Upaya Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Sebagai Tujuan Pidana Penjara untuk

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pembentukan KUHP di Masa Mendatang", *Disertasi,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Phileo Hazelya Motulo, Wempie J. Kumendong, *et al.* "Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Administratum,* Vol. 8, No. 3, Oktober – Desember, 2020.

Putra Aji Widya P. Priambodo, M. Endriyo Susila, *et al.* "Tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tahapan Titipan", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 5, No. 2, September, 2021.

Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, *et al.* "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 17, No. 1, Maret, 2023.

Rivca Pidyananda, Tina Asmarawati, *et all.* "Penerapan Hak-Hak Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Veritatis,* Vol. 1 No. 2, Mei, 2022.

Robert Libra, Muhammad Fauzah, "Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan di bidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2023.

Satria, Nena Eka Saputra, Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal,* Vol. 6, No. 1, Juli, 2022.

Sopiani, Zaindal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 17, No. 2, 2020.

Sintong Frans Butarbutar, "Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen,* Vol. 7, No. 2, April, 2018.

Sri, Wiyanti Eddyono, 2023, "PENOLOGI: Ilmu tentang Pemidanaan", *Bahan Kuliah Penologi Pemasyarakatan,* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Syarif, Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review,* Vol. 6, No. 2, September, 2022.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tom R. Tyler, "Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking", *Journal of Social Issues,* Vol. 62, No. 2, 2006.

Tri Handoko, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan", *UNJA Journal of Legal Studies,* Vol. 1, No. 1, 2023.

Vahronia Ardiyanta, Budhi Wisaksono, *et al.,* "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Blora Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", *Diponerogo Law Journal,* Vol. 6, No. 1, 2017.

Yourike Yasmine Layt, Ade Cici Rohayati, *et.* al, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas 1 Cipinang", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 10, No. 2, 2023.

Yulianto, "Efektifitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure,* Vol. 18, No. 1, Maret, 2018.

Yustianan, Muhammad, Yunus, *et al.,* "Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan *Over Capacity* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Sengkang", *LEGAL: Journal of Law,* Vol. 2, No. 1, Mei, 2023.

C. Internet

Ariel Bleicher, 2021, "Norway's Humane Approach to Prisons Can Work Here Too", *https://magazine.ucsf.edu/norways-humane-approach-prisons-can-work-here-too,*

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan", *https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf*

BBC News Indonesia, 2013, "Penjara 11 Tahun untuk Eksekutor Lapas Cebongan", *https://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/09/130905_vonis_cebongan_wrap.*

Database Peraturan BPK, 2022, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan", *https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DataIndonesia.id, 2023, "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023", *https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023.*

Detik.com, 2012, "Keadilan Substantif dan Keadilan prosedural dalam Konteks Negara", *https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara.*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2022, "Paripurna DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan Jadi UU", *https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39723/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Pemasyarakatan+Jadi+UU*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, "LAPAS Piru Terapkan Prokes Ketat Bagi Tahanan Baru", *http://www.ditjenpas.go.id/lapas-piru-terapkan-prokes-ketat-bagi-tahanan-baru.*

Ferdi Almunada dalam detik.com, 2023, "Kronologi Tahanan Titipan Tewas Dikeroyok di LAPAS Jambi, *https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6909526/kronologi-tahanan-titipan-tewas-dikeroyok-di-lapas-jambi.*

First Step Alliance, 2022, "What We Can Learn From Norway's Prison System: Rehabilitation & Recidivism", *https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons.*

Initial Guidance on the Interpretation and Implementation of the UN Nelson Mandela Rules, London, Penal Reform.

Institute For Criminal Justice Reform, 2011, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia", *https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/.*

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018, "ICRJ Ingatkan Pemerintah untuk Serius dan Berkomitmen dalam Tangani Masalah Pemasyarakatan di Indonesia", *https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-masalah-p emasyarakatan-di-indonesia/.*

Institusi For Criminal Justice Reform, 2019, "ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan", *https://icjr.or.id/icjr-tolak-pembahasan-ruu-pemasyarakatan/.*

Institusi For Criminal Justice Reform, 2021, "Harus Ada Solusi Bersama Institusi dan Lembaga Negara Terhadap Kondisi LAPAS", https://icjr.or.id/harus-ada-solusi-bersama-institusi-dan-lembaga-terhadap-kondisi-lapas/.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2023, "Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Debat Capres Singgung Pemberantasan Korupsi, Tapi Lupa Bahas Salah Satu Sumber Korupsi: Tidak Akuntabelnya Sistem Peradilan Pidana," *https://icjr.or.id/series-respons-icjr-terhadap-debat-capres-perdana-debat-capres-singgung-pembe rantasan-korupsi-tapi-luput-bahas-salah-satu-sumber-korupsi-tidak-akuntabelnya-sistem-peradila n-pidana/.*

Jefrimon dalam Haluan.com, 2022, "Fakta Baru Kematian Tahanan LAPAS Lubuk Basung, Keluarga Ungkap Ada Dugaan Penganiayaan", *https://www.harianhaluan.com/news/pr-102407909/fakta-baru-kematian-tahanan-lapas-lubuk-basung-keluarga-ungkap-ada-dugaan-penganiayaan.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *https://kbbi.web.id/*

KASKUS, 2017, "Fakta Unik Tentang Norwegia Yang Membuat Orang-orang Iri", *https://m.kaskus.co.id/show_post/59d780ff925233891f8b456d*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, "Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia", *https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia.*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, "Sejarah" *https://rutanjogja.org/sejarah/*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI), 2023, "10 Tahanan Baru Masuk LAPAS Sampit Kanwil Kemenkumham Kalteng", *https://sippn.menpan.go.id/berita/61596/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iib-sampit/10-tahanan-baru-masuk-lapas-sampit-kanwil-kemenkumham-kalteng*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, 2018, "Lapas Kelas III Dharmasraya", *https://sumbar.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/lembaga-pemasyarakatan/lapas-klas-iii-dharmasraya,* diakses tanggal 20 Mei 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM), "Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komnas HAM Dorong Ratifikasi OPCAT", *https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/25/1454/hari-anti-penyiksaan-internasional-komnas-ham-dorong-ratifikasi-opcat.html#:~:text=Indonesia%20sebenarnya%20telah%20meratifik*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

asi%20the,Kejam%2C%20Tidak%20manusiawi%2C%20atau%20Merendahkan.

LAPAS Kelas IIA Kediri, 2023, "Meskipun Covid-19 Mereda, LAPAS Kediri Tetap Mengutamakan Prosedur Kesehatan Penerimaan Tahanan Baru", *https://www.lapaskediri.com/tag/tahanan/.*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, 2023, "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Tahanan dan Narapidana, LAPAS Parigi Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan PKBM Mulia Kasih", *https://lapasparigi.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemenuhan-hak-pendidikan-bagi-tahanan-dan-narapidana-lapas-parigi-penandatangan-nota-kesepahaman-dengan-pkbm-mulia-kasih,* diakses 25 Mei 2024.

Merriam-webster, *"dictionary", https://www.merriam-webster.com/dictionary/silent%20system#:~:text=noun,that%20forbids%20c onversation%20among%20prisoners.*

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, 2024, "5 Hal Baru yang Diubah Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan", *https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/5-hal-baru-yang-diuba h-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan*

SH.Net, 2022, "Siksa Aktivis di Tahanan, Kalapas Tahuna Permalukan Institusi Kemenkumham". *https://www.sinarharapan.net/siksa-aktivis-di-tahanan-kalapas-tahuna-permalukan-institusi-kemenkumham/.*

SPD Publik, 2023, "Laporan Jumlah Penghuni", *https://sdppublik.ditjenpas.go.id/.*

SuaraLidik, 2020, "LIDIK PRO Tolak Pengesahan RUU Pemasyarakan, Kelonggaran Terhadap Narapidana Kejahatan Luar Biasa", *https://www.suaralidik.com/lidik-pro-tolak-pengesahan-ruu-pemasyarakatan-kelonggaran-terhada p-narapidana-kejahatan-luar-biasa/.*

The United Nations Standard Minimum Rules of the Treatment of Prisoners.

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Tim Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Tim Komisis Perlindungan HAM (KPAI), Tim Ombudsman Republik

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Indonesia (ORI), Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2019, Kertas Kebijakan Lima Lembaga Negara Tentang Memastikan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Ratifikasi OPCAT, *https://www.komnasham.go.id/files/20211116-kertas-kebijakan-lima-lembaga--$QPAEBH.pdf.*

United Nations Human Rights, "Universal Declaration of Human Rights – Indonesia", *https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.*

United Nations Human Rights Official of the High Commissioner, "Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" *https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat/background-convention#:~:text=The%20 Convention%20against%20 Torture%20and,against%20Torture%2C%20was%20set%20up*.

United Nations Information Centre, Indonesia, "Universal Declaration of Human Rights-Indonesia", *https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian.*

United Nations Office on Drugs and Crime, "Why Promote Prison Reform", *https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/prison-reform-and-alternatives-to-impr isonment.html.*

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990.

Universitas Islam Indonesia, 2021, "Solusi Mengatasi LAPAS Kelebihan Kapasitas", *https://www.uii.ac.id/solusi-mengatasi-lapas-kelebihan-kapasitas/.*

Yale Law School, *Procedural Justice, https://law.yale.edu/justice-collaboratory/procedural-justice.*

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMENUHAN HAK TAHANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
Dita Gusnawati, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Republik Indonesia 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8642).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan RUTAN.

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor 02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH-06.OT.01.01 Tahun 2014 tentang tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Blangpidie, Dharmasarya, Banjaibaru, Pohuwati, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Batam, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sawah Lunto, Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.

BPHN, 2017, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan”.